

**AKUNTABILITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM DANA
DESA SUMERTA KAUH TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Ni Putu Wulan Darmayanti, Putu Nomy Yasintha, Putu Eka Purnamaningsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

wulandarmayanti09@gmail.com, putu_nomy@unud.ac.id, ekapurnama@unud.ac.id

ABSTRACT

Job and government strategy gave BLT-Funds to help individuals impacted by pandemic Responsibility is required as a type of responsibility for the town government in dealing with these assets. One of the towns whose responsibility can be noticed is Sumerta Kauh Village, which is situated in East Denpasar District, Denpasar City. This study expects to examine the impact of introducing a responsibility report on the responsibility of BLT-Dana Sumerta Kauh Village the executives in 2020. The exploration technique utilized in this study was graphic subjective. Information were gathered by perception, interview and documentation strategies. The examination utilizes the hypothesis of accomplishment as per the idea of responsibility in view of the assessment of Jay M. Shafritz and E.W Russel (1977:368) which can be estimated by markers, specifically; The most common way of settling on a choice that is made recorded as a hard copy, accessible to occupants and fulfilling relevant regulatory guidelines gets ideal outcomes, both The precision and culmination of data connecting with ways of accomplishing the objectives of a program has been very much shown by the Sumerta Kauh Village Government. From the goals to be accomplished, a few assessments are required, the fourth is the practicality and consistency of the functional focuses on, the five administration data frameworks and observing of results have been completed ideally. The consequences of the review expressed that the introduction of a responsibility report was expected to make the progress of a program..

Keywords: Village, Assistance, Accountability

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memerangi dampak Pandemi COVID-19. Kemudian, pada saat itu, otoritas publik membuat strategi Program BLT-DD dengan tujuan akhir guna membantu masyarakat terdampak Covid-19 dalam mengatasi kebutuhan daerah setempat selama pandemi, jumlah tersebut didapat oleh daerah tersebut setara dengan waktu sosialisasi BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai April 2020. pada 3 bulan awal mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000 misalnya April, Mei, dan Juni. Untuk bulan berikutnya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan Juli sampai Desember 2020 yang langsung disetorkan oleh Pemerintah Desa ke daerah setempat. Program bantuan dikenang untuk skala kebutuhan dalam pemanfaatan Dana Desa 2020 dan merupakan salah satu proyek dalam petak pemulihan keuangan masyarakat yang oleh sebagian besar dianggap biasa saja. Memperpanjang waktu program BLT Dana Desa untuk membatasi dampak moneter terhadap daerah setempat. kota-kota yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Dari satu sisi, strategi BLT Dana Desa seharusnya memfasilitasi bobot jaringan yang terkena dampak COVID-19. Kota-kota yang mendapatkan cadangan kota, diharapkan dapat

menangani kemampuan lingkungan kota dalam melakukan hak-hak istimewa dan komitmen mereka secara lugas dan memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti yang dikomunikasikan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) tanggung jawab mencakup kapasitas pemerintah kota untuk mewakili latihan yang diselesaikan sebanding dengan masalah perbaikan dan administrasi kota. Di dalam lingkup pemerintahan kota, tanggung jawab terkait dengan masalah moneter yang diatur dalam APBDes Dana Desa sebagai salah satu bagian di dalamnya.

Salah satu kota yang dapat diperhatikan tanggung jawabnya adalah Desa Sumerta Kauh Desa Sumerta Kauh merupakan salah satu kota yang muncul karena pemekaran dari Desa Sumerta (Sumerta Village). Pemerintah kota atau perangkat kota, khususnya di Desa Sumerta Kauh, harus lebih terbuka dalam menyampaikan sosialisasi dan pemanfaatan program ini untuk menangani perekonomian di masa covid. Pakar mendapatkan informasi dari persepsi awal langsung, khususnya individu yang memenuhi syarat mendapatkan Dana BLT Desa di Desa Sumerta Kauh, khusus ada 166 KK yang terdiri dari 6 villa,

Pada tahun 2020 Desa Sumerta Kauh mendapat pertukaran aset dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.011.658.000 pada tanggal 23 April 2020. Harta yang diedarkan sebanyak

Rp. 303.497.400 untuk BLT-DD yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 9 (sembilan kali) Penyaluran mulai Mei 2020 sampai dengan akhir Desember 2020. Dimana Pemerintah Desa harus memindahkan pemanfaatan Dana Desa yang semula dimanfaatkan untuk empat kota spesialis mulai dari pelaksanaan pemerintahan kota, pelaksanaan pembangunan kota, pengembangan wilayah kota dan penguatan wilayah kota harus diarahkan atau sampai batas tertentu redistribusi untuk bertahan hidup dan mencegah masalah sosial dan keuangan karena pandemi COVID-19, salah satunya adalah di bidang bencana pangan, krisis dan kota yang menggembirakan.

1.1. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana program BLT Dana Desa paa Tahun 2020 di Sumerta Kauh yang dilihat dari prinsip akuntabilitas?

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Agar dapat menilai akuntabilitas program BLT Dana Desa Tahun 2020 di Sumerta Kauh saat Covid 19.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui buku referensi atau literatur. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau mengkaji dan mengutip pendapat para ahli terkait dengan masalah yang diteliti. Masih sedikit penelitian tentang Akuntabilitas Program BLT-DD. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian "Akuntabilitas Program BLT-DD

dalam Anggaran Dana Desa 2020 Selama Pandemi COVID-19", penulis memilih beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Collins, Teeroven, dan Martin dengan judul penelitian "Governance Structure, Voluntary, Disclosures and Public Accountability: The Case of UK Higher Education Institutions". Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas di lembaga pendidikan tinggi (HEIs) Inggris dalam bentuk laporan tahunan dan menguji apakah struktur tata kelola internal mempengaruhi akuntabilitas pada periode pasca reformasi dan pendanaan menjadi kendala utama. Para penulis mengadopsi versi indeks akuntabilitas publik Dixon.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Windyastuti dkk (2019) dengan judul penelitian "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Ngawen, Blora, Jawa Tengah". Penelitian yang membahas tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan alat analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Semakin tinggi akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Ngawen maka semakin baik pengelolaan alokasi dana

desa. Kemudian pada dimensi transparansi menunjukkan bahwa transparansi yang lebih baik dari Kabupaten Ngawen akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Arima Andhika Ayu dkk (2020) dengan judul penelitian "Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal di Kabupaten Sragen Di Era Pandemi COVID-19". Penelitian yang membahas tentang peningkatan keberdayaan dan penanganan bencana yang tidak terduga, seperti saat ini di era pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat desa di era pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. metode ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Studi Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal di Era Pandemi Covid-19 dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan cadangan kota. Program yang diselesaikan dengan kelompok masyarakat Desa Jekawal dapat menghadapi pandemi yang sedang berlangsung dan membangun jaringan pedesaan, kebutuhan pemanfaatan keuangan kota harus sesuai Permendesa dan fokus pada penguatan wilayah lokal yang lebih baik.

Kajian keempat merupakan review yang dilakukan oleh Heri Sutanto dkk (2021) dengan judul eksplorasi "Pemeriksaan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran

Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19 2020". Motivasi penelitian ini adalah untuk menentukan standar tanggung jawab pemerintah kota Ngareksidul dalam mengawasi perubahan penetapan rencana belanja Dana Desa selama Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik subjektif dengan investigasi spellbinding. Pemerintah Desa Ngareksidul telah menjalankan standar tanggung jawab dalam mengawasi perubahan porsi rencana belanja Dana Desa selama Pandemi COVID-19 2020. Standar tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman administrasi moneter, khususnya tahap persiapan, pelaksanaan, organisasi, perincian dan tanggung jawab. Pemerintah Desa Ngareksidul dalam penyelenggaraan perubahan penyaluran rencana belanja Dana Desa 2020, melihat adanya kendala pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sementara itu, untuk fase regulasi dan detail perubahan rencana keuangan, pemerintah Desa Ngareksidul tidak menemukan halangan.

Pemeriksaan kelima adalah review yang dilakukan oleh Kurnia Sandhi dkk (2020) dengan judul eksplorasi "Praktik Pengelolaan Dana Kota Untuk Penanganan COVID-19 (Studi di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). Jenis eksplorasinya adalah ekspresif subjektif. Artikel yang menjadi pertimbangan adalah amalan pengurus Dana Desa penanganan pandemi COVID-19 di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Informasi yang dikumpulkan meliputi informasi periode

awal penanganan COVID-19. diselesaikan dengan pembahasan Sekdes, dan penelusuran dokumentasi APBD beserta perubahannya, beserta arsip Hasil pemeriksaan APBD Bendo dibagikan untuk latihan di Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, yang penanganan COVID -19 difokuskan melalui Program Tanggap Darurat CPID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Pekerjaan Padat Tunai (PKT). Bagian BLT untuk Dana sx n, Desa Bendo secara lengkap adalah 24,7% (dibawah 35%), sehingga tidak diperlukan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Penyaluran BLT di Desa Bendo dilakukan dengan uang asli. Dana Desa Bendo telah diawasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Sebagai aturan umum, tindakan mengawasi cadangan kota adalah sesuai pedoman yang relevan.

Dari lima pemeriksaan terakhir yang telah digambarkan di atas, cenderung terlihat adanya kesamaan dan kontras dengan eksplorasi yang dipimpin oleh para analis pasang surut, lebih spesifik "Tanggung Jawab Program Bantuan Langsung Tunai dalam Anggaran Dana

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Proses Bantuan langsung Tunai di

Desa Sumerta Kauh

nProgram Bantuan Langsung Tunai (BLT) didorong oleh upaya untuk mengimbangi tingkat pemanfaatan Rumah Tangga Sasaran (RTS) karena pandemi yang mempengaruhi perekonomian daerah, khususnya masyarakat miskin yang terkena dampak.

Desa 2020 di Desa Sumerta Kauh Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).)". Yang pertama adalah perumpamaan pemeriksaan masa lalu dengan eksplorasi pencipta, lebih spesifiknya baik menyelidiki bagaimana mensosialisasikan proyek-proyek cash move dan menangani COVID-19 menurut perspektif moneter bagi individu-individu yang telah mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Perbedaan antara eksplorasi ini dan investigasi sebelumnya adalah bahwa pemeriksaan ini secara positif berpusat pada bagaimana menyalurkan dan melaksanakan tanggung jawab program Dana Desa BLT. Kemudian, pada titik itu, perbedaan lain, jelas, terletak pada berbagai objek eksplorasi

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis dengan judul "Akuntabilitas Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Dana Desa Tahun 2020 Pada Masa Pandemi" yaitu menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. informasi-informasi berkaitan dengan implementasi dana desa serta realisasi dari penggunaan dana desa tersebut.

Kepala Desa Sumerta Kauh, I Wayan Sentana S.H secara lugas menyampaikan pemikiran tersebut bersama komponen DPRD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi perangkat desa, khususnya kepala desa, Satgas Linmas dan Gugus Tugas Covid 19 Angkatan Sumerta Kauh Village.), termasuk komponen daerah, untuk pelaksanaan Musdes dan Musrenbangdes. Pelaksanaan musdes atau musrenbang kota berpotensi sebagai

tandingan pemikiran dan pemikiran dari tingkat bawah sebagai tanda keinginan yang terbentuk dari daerah setempat. Dalam melakukan proses pemilahan dan pengecekan informasi bagi penerima manfaat yang direncanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperoleh dari Dana Desa (DD) 2020. Keterkaitan Implementasi Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.

1. Pembuatan Keputusan

Pelaksana program BLT adalah Pemerintah Desa, yang dimotori oleh Kepala Desa Sumerta Kauh sebagai kemampuan untuk mengelola rencana belanja, dibantu oleh Dinas Sosial untuk membantu pemerintah kota dan pihak-pihak daerah setempat yang masih mengudara dengan Perda. Penyaluran BLT kepada kelompok masyarakat Desa Sumerta Kauh di Rumah Tangga Sasaran merupakan salah satu bentuk partisipasi mengingat kemampuan dan kewajiban pokok tertentu, dengan organisasi yang bertanggung jawab atas kelancaran bidang pekerjaannya masing-masing. Dalam upaya bersama ini diharapkan dapat mempercepat cara yang paling umum untuk menggunakan aset BLT kepada keluarga tujuan kumpul sehingga pemanfaatannya ternyata lebih berpengaruh.

2. Akurasi Untuk Mencapai Sasaran Suatu Program

Standar untuk mendapatkan bantuan uang langsung (BLT) tidak sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah kota. Mengejar sebuah keputusan tentu bukanlah sesuatu yang

mudah dilakukan, namun melalui tahapan yang panjang, sehingga bisa terlihat layak seperti yang ditunjukkan oleh model materialnya. Aturan sering disinggung sebagai "benchmark" atau "pedoman". Dasar berarti sesuai dengan apa yang digunakan sebagai tolak ukur atau paling tidak batas untuk mengukur sesuatu. Selanjutnya, norma jaminan atau premis dimana pilihan elektif diminta oleh keinginan tindakan yang sebenarnya. (The Balance Careers 2020:11).

3. Kejelasan Dari Tujuan Yang Ingin Dicapai Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Desa Sumerta Kauh

Petunjuk berikut, khususnya kejelasan tujuan yang ingin dicapai, dapat muncul melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai (BLT)) adalah program remunerasi sementara yang dimaksud, dalam tingkat pemanfaatan keluarga. Target. Apalagi keluarga, termasuk orang yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin (hampir miskin), tidak masuk akal pada saat efek Covid-19 bisa terjadi kemelaratan yang tumbuh di dalam negeri. Dengan ini, meskipun program BLT bukanlah program yang peduli pada masalah kemiskinan, ia ingin mendukung pengurangan kemiskinan, ketika terjadi peningkatan biaya kebutuhan hidup individu ke arah yang lain. keseimbangan (Tangkilisan, 2010: 65).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan yang ada bahwa. Sasaran sosialisasi BLT adalah:

- Bekerja pada keberadaan individu yang terkena dampak Pandemi Covid-19
- Menawarkan bantuan untuk kebutuhan hidup bagi keluarga yang kurang mampu.

4. Target Pada Operasional

Dari wawancara terputus yang dipimpin oleh para ilmuwan, para spesialis memperoleh hasil yang menyertainya:

1. Saksi 1 bernama Toni berumur 57 tahun. Mengisi sebagai sopir bemo, ia kehilangan pekerjaan karena tidak ada musafir, adalah puncak keluarga dengan 3 bangsal. Berasal dari banjar, desa Pagan Kaja. Disebutkannya, BLT yang diberikan oleh otoritas publik cukup membantu perekonomian masyarakat kelas bawah di masa pandemi ini. Meski demikian, BLT yang disebarluaskan dinilai belum tepat sasaran, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan meskipun sebenarnya mereka sangat membutuhkannya. Anjuran yang diberikan adalah bahwa otoritas publik tidak bergantung pada kepala desa terdekat untuk mendapatkan informasi, namun dipercaya bahwa aparat dari kecamatan akan langsung melihat keadaan daerah setempat di lapangan.
2. Sumber 2 bernama Sudarma 47 tahun. Sampai saat ini tidak bekerja karena telah di keluarkan dari organisasi tempat dia bekerja baru-baru ini karena pandemi COVID-19, merupakan keluarga puncak dengan

2 bangsal. Berasal dari Dusun Banjar/Kelandis. Sebagian besar bantuan yang tersampaikan tidak on track, misalnya sumber yang tidak mendapatkan bantuan dengan cara apapun meskipun saksi juga merasakan dampaknya. Saran yang diberikan adalah agar otoritas publik dapat mengumpulkan informasi lebih tepat mengingat masih banyak orang-orang kelas atas yang benar-benar mendapatkan bantuan.

3. Sumber 3 bernama Wicaksana berusia 50 tahun. Saat ini, dia benar-benar tidak memiliki gaji karena pekerjaannya di masa lalu hanya aneh, dan sejak pandemi gajinya sama sekali tidak ada, menjadi keluarga teratas dengan 1 lingkungan. Berasal dari Banjar Dusun Eka Dharma. Menurutnya, bantuan BLT tidak sedikit pun di jalurnya. Selama diterbitkannya pedoman tersebut, saksi sangat mengharapkan adanya bantuan tersebut. Namun, sebagai aturan umum, sampai saat ini, sumber belum mendapatkan bantuan apa pun. Bimbingan yang diberikan adalah agar otoritas publik lebih spesifik dalam memberikan bantuan kepada daerah.

4. Sumber 4 bernama Anwar berumur 40 tahun. Seorang desainer yang gajinya kini kian menipis di tengah pandemi COVID-19, merupakan pucuk keluarga dengan 2 kelurahan. Berasal dari Banjar Dusun Ratna Bhuwana. Menurutnya, BLT pada awalnya berjalan positif dan sudah mendapatkan dan BLT sejak lama. Bagaimanapun, terungkap bahwa bulan berikutnya tidak ada dana BLT

dari kota dengan cara apa pun. Saran yang diberikan adalah agar otoritas publik lebih khusus lagi memberikan bantuan kepada daerah.

5. Saksi 5 bernama Pak Toni adalah salah satu orang yang merasakan manfaat dari BLT yang diberikan oleh otoritas publik. Sumber mendapat BLT selama 6 bulan berturut-turut dan bantuan tersebut cukup untuk membantu perekonomian keluarganya. Ide-ide diberikan agar otoritas publik tidak memihak kelas pekerja yang lebih rendah dan menambahkan lebih banyak bantuan kepada individu yang benar-benar membutuhkannya.

Sumber 6 bernama Eni berusia 23 tahun. Seorang pekerja rahasia yang kehilangan pekerjaannya sejak dia diberhentikan. Berasal dari Dusun Banjar Kelandis. Menurutny, pemberian BLT sangat bermanfaat, karena saksi merupakan salah satu orang yang mendapat bantuan. Pemberian BLT tepat sasaran sesuai inisiatif yang didukung wajib pajak. Pembinaan yang diberikan dipercaya agar bantuan dapat tersirkulasi lebih merata dan tepat sasaran serta tidak bergantung pada kelurahan seperti Kepala Dusun di setiap kecamatan.

5. Monitoring Hasil Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pemerintahan Desa Sumerta Kauh

Secara praktis, penyebarluasan Bantuan Langsung Uang (BLT-DD) kepada Pemerintah Desa Sumerta Kauh mencari standar Good Governance dalam hal keterusterangan dalam keuangan negara. Hal itu ditunjukkan dari informasi BLT-DD yang tercatat di situs

<https://sumertakauh.denpasarkota.go.id/setiapperiode> dan secara konsisten BLT-DD atau BLT tersebut ditransfer dan disegarkan dengan pura-pura yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Pemerintah.

Pengamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kauh kurang memuaskan dan memusatkan perhatian pada keterusterangan penerima BLT-DD, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya.

Dari hasil pertemuan dengan beberapa kelompok, tidak adanya pengecekan langsung dari Kepala Desa ke bagian pengangkut BLT, khususnya Bagian Pelayanan dan Keuangan yang menyebabkan penyebaran BLT-DD tidak terlalu bagus dengan banyak orang. menggerutu bahwa mereka tidak mendapatkan BLT-DD.

4.2. Analisis Hasil Temuan

4.2.1. Keterkaitan Pelaksanaan Akuntabilitas

Dalam penelitian yang diarahkan oleh para ahli di BLT-Dana Desa melalui wawancara dengan Kepala Dusun Sumerta Desa Kauh, Kepala Desa, dan beberapa jaringan lingkungan dalam menyelesaikan gagasan tanggung jawab dalam 5 (lima) petunjuk evaluasi sebagai berikut:

4.2.1.1. Pembuatan Keputusan Bagi Masyarakat

Petunjuk utama dalam eksplorasi ini adalah cara paling umum untuk menetapkan pilihan yang dibuat direkam sebagai salinan cetak, dapat diakses oleh penduduk dan memenuhi pedoman peraturan terkait, menyiratkan bahwa suatu strategi harus dilaporkan secara tertulis dan dapat dicapai

oleh populasi umum dan apakah pembuatan strategi telah memenuhi pedoman dari premis yang sah di masa lalu.

Dalam tinjauan lapangan dalam tinjauan ini, Pemerintah Desa Sumerta Kauh dapat menunjukkan bahwa latihan dicatat melalui laporan tercetak atau laporan dalam struktur aktual hanya selama penyampaian BLT-DD dan dilihat secara eksklusif sebagai konvensi. Interaksi dari awal pengarahannya, tinjauan umum dan laporan terakhir tidak diarsipkan sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kauh. Sehingga ada kendala data yang bisa didapatkan oleh daerah terkait dengan pelaksanaan BLT-DD Covid-19 di Desa Sumerta Kauh.

4.2.1.2. Cara Pencapaian Sasaran Suatu Program

Petunjuk berikut adalah ketepatan dan pemenuhan data terkait dengan cara-cara pencapaian tujuan suatu program, dan itu dimaksudkan agar ada data yang lengkap dan tepat mengenai kelanjutan program yang mengacu pada pencapaian fokus. dalam laporan yang ditunjukkan oleh Pemdes dalam wawancara, khususnya pada jam pertemuan terkait masalah pengumpulan informasi penerima BLT-DD di Desa Sumerta Kauh yang mengarah pada penilaian populer mengingat fakta bahwa tidak semua orang menyelesaikan catatan koleksi informasi dengan benar. Klarifikasi dan dukungan terhadap kegiatan pemerintah Desa Sumerta Kauh harus sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak disembunyikan. Dalam pengakuannya, Pemerintah Desa Sumerta

Kauh jelas telah menyelesaikan sosialisasi kepada seluruh warga Desa Sumerta Kauh untuk permohonan informasi penerima BLT-DD. Penanda ini sudah sangat ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kauh melalui hasil pertemuan dengan Kepala Desa I Wayan Sentaha S.H. Sehingga para ilmuwan mendapatkan gambaran yang wajar dari berbagai macam data tentang berbagai informasi untuk penerima BLT-DD oleh otoritas pemerintah kota dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumerta Kauh. Sebagian dari kelemahan klarifikasi tersebut telah dijawab melalui laporan-laporan yang membantu BLT-DD yang telah menggambarkan secara mendalam teknik dan informasi yang diharapkan dapat diselesaikan atau diteruskan untuk mendapatkan data yang bagus tentang penerima BLT-DD

4.2.1.3. Kejelasan Dari Tujuan Yang Ingin Dicapai.

Petunjuk berikut, untuk lebih jelasnya tentang kejelasan tujuan yang ingin dicapai, dapat dimunculkan melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa tahun 2020. Penanda ini harus terlihat melalui pelaksanaan pembuatan laporan berdasarkan premis yang sah dan mengacu pada target tertentu yang ingin dicapai. ahli.

Kejelasan tujuan ini menyinggung hasil yang ingin dicapai dalam suatu tindakan melalui pemberian BLT-DD kepada seluruh kelompok masyarakat Desa Sumerta Kauh yang terkena dampak Covid-19. BLT Desa Sumerta Kauh- Program DD telah

menyatakan tujuan yang secara eksplisit mengantisipasi bahwa suatu penilaian harus diselesaikan pada tahun Laporan akan lebih baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan konsistensi yang nantinya dapat direpresentasikan kepada masyarakat umum

4.2.1.4. Kelayakan Dan Konsistensi Dari Target Operasional.

Tanda tanggung jawab keempat, lebih spesifik kemungkinan dan konsistensi target fungsional, menyiratkan bahwa pelaksanaan program BLT-Dana Desa pada tahun 2020 dapat mencerminkan kepraktisan dan konsistensi target fungsional yang harus dicapai.

Akibat dari penyelidikan ini ditemukan bahwa sebagian besar sumber memberikan reaksi yang tidak menyenangkan, terutama dengan alasan bahwa BLT yang diberikan oleh otoritas publik tidak sempurna. Bantuan ini membantu perekonomian daerah, khususnya yang terkena dampak pandemi COVID-19, .

4.2.1.5. Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil

Alasan pengamatan dampak BLT-DD Desa Sumerta Kauh adalah untuk menjamin hasil akhir lebih terkontrol dan informasi peruntukan BLT-DD yang diperoleh tentunya akan lebih tepat. Hal ini menghindari human blunder dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumerta Kauh pada tahun 2020. Melalui pemeriksaan yang dilakukan pembuatnya, kerangka data administrasi sudah berjalan dengan baik di Desa Sumerta, namun lagi-lagi terkait dengan hasil pengecekan, ada informasi sinkronisasi dari penerima manfaat yang telah menandai informasi penerima.

BLT-DD dan dampak pertemuan langsung dengan banyak pihak yang belum mendapatkan BLT-DD karena belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah Desa Sumerta Kauh.

4.2.2. Faktor Penghambat Realisasi BLT-DD Dana Desa Sumerta Kauh

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab toko kota BLT-DD menjadi ilustrasi yang signifikan bagi pemerintah Desa Sumerta Kauh karena hasil akhir dari tindakan BLT-DD tersebut hingga saat ini masih terlihat menjadi penghambat yang menghambat jalannya latihan. . Dalam tinjauan ini, terdapat kendala dalam menjalankan latihan BLT-DD Dana Desa Sumerta Kauh, antara lain:

1. Siklus dinamis penerima bantuan uang langsung dari Pemerintah Desa Sumerta Kauh tidak mempengaruhi setiap orang yang benar-benar terkena PHK.
2. Ada oknum yang tidak mendapatkan kebebasannya terhadap Dana Desa Sumerta Kauh BLT-DD
3. Tidak salah lagi mengamati hasil akhir dari Pemerintah Desa Sumerta Kauh atas informasi siapa saja yang mendapatkan BLT-DD Dana Desa Sumerta Kauh 2020

4.2.3. Rekomendasi *Good Governance* dalam Akuntabilitas Dana Desa Sumerta Kauh

Komponen penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab town store BLT-DD menjadi contoh nyata bagi pemerintah Desa Sumerta Kauh mengingat produk akhir dari aksi BLT-DD tersebut masih terlihat berupa efek jera yang melambat.

kursus latihan. Dalam tinjauan ini, terdapat hal-hal yang menjadi penghambat dalam menjalankan latihan BLT-DD Dana Desa Sumerta Kauh, antara lain:

1. Dinamika interaksi penerima bantuan uang langsung dari Pemerintah Desa Sumerta Kauh tidak mempengaruhi setiap individu yang benar-benar terkena PHK.
2. Ada oknum yang tidak mendapatkan haknya atas Dana Desa Sumerta Kauh BLT-DD
3. Tidak ada pengamatan yang wajar atas hasil akhir dari Pemerintah Desa Sumerta Kauh atas informasi siapa saja yang mendapatkan BLT-DD Dana Desa Sumerta Kauh 2020.

KESIMPULAN

Mengingat konsekuensi dari pengumpulan informasi dan pemeriksaan yang dipimpin oleh pencipta, dapat diduga bahwa tanggung jawab dalam peredaran BLT-Dana Desa telah berjalan sesuai dengan premis yang sah namun masih banyak data yang tidak 't idealnya tersebar ke individu-individu Desa Sumerta Kauh, menyebabkan keterbatasan data dan menyebabkan penyimpangan sosial. Pandangan tanggung jawab cenderung diperkirakan dengan petunjuk-petunjuk berikut:

1. Petunjuk utama adalah cara paling umum untuk menentukan pilihan yang dibuat dalam bentuk hard copy, dapat diakses oleh penghuni dan memenuhi pedoman manajerial material. Mengingat hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh ahli, petunjuk ini membatasi data yang terkait dengan informasi dokumentasi dari semua

kegiatan Pemerintah Desa Sumerta Kauh dalam gerakan Covid-19 BLT DD, pencipta menilai bahwa Desa Sumerta Kauh belum memiliki opsi untuk memberikan kehalusan. dengan alasan bahwa informasi tersebut akan sangat berbahaya atau tidak aman.

2. Ketepatan dan pemenuhan data terkait dengan cara mencapai tujuan suatu program. Penunjukan ini sudah keliling dipamerkan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kauh melalui hasil pertemuan dengan Kepala Desa I Wayan Sentaha S.H. Sehingga para ilmuwan mendapatkan gambaran yang wajar dari berbagai macam data tentang berbagai informasi untuk penerima BLT-DD oleh otoritas pemerintah kota dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumerta Kauh.
3. Kejelasan target yang ingin dicapai, penanda ini memaknai tujuan program BLT Dana Desa. Desa Sumerta Kauh telah menyampaikan suatu tujuan yang secara tegas ingin dicapai suatu penilaian dalam laporan tersebut menjadi lebih baik sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsistensi yang nantinya dapat direpresentasikan ke daerah setempat.
4. Kemungkinan dan konsistensi fokus fungsional, konsekuensi dari penyelidikan ini menemukan bahwa lebih banyak sumber memberikan reaksi yang tidak menguntungkan, sebagian besar mengingat fakta bahwa BLT yang diberikan oleh otoritas publik tidak pada

jalurnya dan dapat dikatakan bahwa penanda itu tidak ideal.

5. Papan dan kerangka data pengecekan terkait dengan hasil observasi, terdapat kesalahan informasi dari penerima yang telah menandai informasi penerima BLT-DD dan akibat dari pertemuan langsung dengan banyak individu yang belum mendapatkan BLT-DD

SARAN

Para ilmuwan mungkin ingin menyampaikan ide dan info, termasuk:

1. Untuk mempertanggung jawabkan penyelenggaraan peredaran uang langsung, perlu adanya kerjasama antara pemerintah kota, SDM atau daerah setempat, keterusterangan dan fokus serta informasi administrasi keuangan yang memuaskan agar tidak menimbulkan kemerosotan kegiatan pengawasan cadangan. Selain itu, pengumpulan

informasi yang dipimpin oleh pemerintah kota harus lebih luar dan dalam karena masih banyak kepala keluarga yang dianggap tertindas tetapi tidak segera mendapatkan bantuan uang.

2. Dalam penyampaian BLT perlu diperhatikan peredaran BLT yang jelas dan dapat diperkirakan bagi individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT secara adil dan merata dan sesuai jumlah dari awal sampai batas terjauh sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, Budi dkk.2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. LPKPAP
- Sapirin, Sumber.2004. Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintah Desa (Cetakan Ketiga). Jakarta. Ghali
- Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, (1997), *Introducing Public Administration*. USA: Longman.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: LP3E5
- Sugiyonno, 2012. *Peelitian kualitatif dan R & B*, Lembang: Alifbata